



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PENGUMUMAN

Nomor: 33/PP.00/05/2021

Tentang HASIL PENILAIAN TAHAP I PROPOSAL PENELITIAN KOMPETITIF KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN FAKULTAS HUKUM PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA TAHUN 2021

Berdasarkan data penerimaan proposal penelitian kompetitif kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2021 sampai dengan batas waktu yang ditentukan telah diterima sebanyak 111 (seratus sebelas) proposal penelitian sebagaimana tercantum pada **Lampiran II**.

Terhadap proposal tersebut telah dilakukan *review* oleh *Tim Reviewer* melalui mekanisme *blind review* dan terpilih 9 (sembilan) proposal (3 (tiga) proposal/regional) yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian tahap II.

Penilaian tahap II atas 9 (sembilan) proposal tersebut untuk menentukan 3 (tiga) proposal terbaik yang akan dikerjasamakan dengan Mahkamah Kostitusi. Hal-hal yang perlu diketahui dalam penilaian tahap II antara lain:

1. Penilaian tahap II dilakukan dengan cara presentasi proposal penelitian oleh masing-masing Tim Peneliti pada hari **Senin tanggal 24 Mei 2021** melalui aplikasi *Zoom meeting* sebagaimana jadwal yang telah ditentukan pada **Lampiran I**;
2. Link zoom meeting akan diberitahukan ke masing-masing tim peneliti sehari sebelum dilaksanakannya presentasi;
3. Durasi presentasi proposal penelitian masing-masing Tim Peneliti paling lama 45 menit yang meliputi pemaparan 10 menit dan tanya jawab 35 menit.
4. Semua tim yang mengikuti penilaian tahap II wajib menyampaikan bahan presentasi dalam bentuk power point yang dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kapuslitka paling lambat **hari Minggu tanggal 23 Mei 2021** melalui email puslitka@mkri.id cc: puslitka_mk@yahoo.com

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan keputusan Tim Reviewer Proposal Penelitian Kompetitif bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 18 Mei 2021
Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Digital Signature
[mk1101593135210518041515](https://www.mkri.id/mk1101593135210518041515)

Lampiran I

Pengumuman Nomor 33/PP.00/05/2021

PROPOSAL YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI TAHAP II

No	Judul Proposal Penelitian	Asal Universitas	Regional	Waktu (WIB)
1	Penguatan Sistem Presidensial dan Masa Depan Pemilu Serentak Yang Berkeadilan di Dalam Bingkai Putusan Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019)	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Timur	09.00 - 09.45
2	Masa Depan Otonomi Daerah Terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi Ataupun Desentralisasi)	Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara	Timur	09.45 - 10.15
3	Dinamika Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Mahkamahkonstitusi : Telaah Terhadap Desain Penyelesaian sengketa Pemilu Secara Serentak Tahun 2024 Dalam upaya Mewujudkan Keadilan Substantif	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Timur	10.15 - 11.00
4	Alternatif Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Tengah	11.00 - 11.45
Istirahat				
5	Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berkaitan Dengan Penerapan "State of Exception" dalam Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Indonesia	Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Tengah	13.00 - 13.45
6	Rekonstruksi Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat	Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	Tengah	13.45 - 14.15
7	Judicial Restraint Terhadap Sengketa Perselisihan Pemilu serentak 2024 Demi Perwujudan Putusan Mahkamahkonstitusi Yang Responsif Dan Futuristik	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Barat	14.15 - 15.00
8	Implikasi UU Cipta Kerja Terhadap Administrasi Pemerintahan dan Penyelesaian Sengketa Administrasi Berdasarkan Konsepsi Negara Hukum	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Barat	15.00 - 15.45
9	Rekonseptualisasi Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Barat	15.45 - 16.15



DAFTAR PROPOSAL PENELITIAN KOMPETITIF TAHUN 2021

NO	JUDUL PROPOSAL	ASAL UNIVERSITAS	REGIONAL
1	Urgensi Pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Checks and Balances Melalui Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	TENGAH
2	Reformulasi Undang-Undang Cipta Kerja: Satu Upaya Pendukung Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja	Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	TIMUR
3	Desain Pembatasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Fakultas Hukum Universitas Islam Malang	TIMUR
4	Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Menurut Pasal 10 Ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan Serta Kaitannya Dengan Hak Prerogatif Presiden Dalam Menanggapi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)	Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	BARAT
5	Prospek Undang-Undang Cipta Kerja Mewujudkan Hak Atas Pekerjaan Pada Masa Pandemi Covid 19	Fakultas Hukum Universitas Jember	TIMUR
6	Konstruksi Ius Constituendum Pengadilan Khusus Pemilihan Umum Di Indonesia	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya	TIMUR
7	Problematika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Final Dan Mengikat Terhadap Impeachment	Fakultas Hukum Universitas Jambi	BARAT
8	Perbandingan Hukum Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang Berbasis Omnibus Law di Indonesia Dengan di Negara Bersistem Hukum Common Law Dan Civil Law	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	TIMUR
9	Dampak Keberlakuan Aturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Di Wilayah Industri Kabupaten dan Kota Bekasi	Fakultas Hukum Universitas Pamulang	BARAT
10	Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menafsir Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Pembentukan, Menganalisis, Mengkaji dan Mengevaluasi Peraturan Perundang-Undangan	Fakultas Hukum Universitas Jambi	BARAT
11	Norma Pemajuan HAM dan Degradasi Hak Pekerja dalam UU Cipta Kerja	Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	TENGAH
12	Justice Office Sebagai Support System Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Daerah Serentak Tahun 2024	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	TIMUR
13	Penyerderhanaan Izin Usaha Pasca Undang-undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha	Fakultas Hukum Universitas Andalas	BARAT
14	Kondisi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif UUD 1945	Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam	BARAT



NO	JUDUL PROPOSAL	ASAL UNIVERSITAS	REGIONAL
15	Alternatif Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	TENGAH
16	Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang dalam Keadaan Darurat	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	BARAT
17	Urgensi Constitutional Complaint Dalam Hukum Tatanegara Darurat	Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri	TENGAH
18	Kajian Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi No 56 /PUU-IV/2016	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari	TIMUR
19	Peradilan Khusus Pemilu: Sebuah Gagasan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Yang Demokratis Dan Berkeadilan	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	BARAT
20	Transformasi Risk Based Approach Menuju Human Rights Impact Assesment Pada Klaster Perizinan Usaha Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja Dalam Memperkuat Hak Asasi Manusia	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	BARAT
21	Permasalahan Konstitusional Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	TIMUR
22	Kedudukan Omnibus Law Pada Negara Yang Menganut Civil Law System	Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah	TIMUR
23	Re-Desain Model Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya	TIMUR
24	Dilema Pengadilan Pilkada Serentak Nasional 2024 (Antara Mahkamah Konstitusi atau Badan Peradilan Khusus)	Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo	TIMUR
25	Politik Hukum Penetapan Keadaan Bayaha: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat (Kepres DOM Aceh 2003 dan Kepres Pandemi Covid-2019)	Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien	BARAT
26	Konstitusionalisme Hukum Tata Negara Darurat Kesehatan Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	BARAT
27	Pelaksanaan Norma-Norma dalam UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019 di Mahkamah konstitusi (MK)(Upaya Mengikis Sikap Pemerintah dan DPR Terhadap UU Cipta Kerja	Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun-Jakarta	BARAT
28	Pemilu Serentak dan Gagasan Pembentukan badan Peradilan Khusus Serta Implikasinya Terhadap Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Penanganan Sengketa Pemilu (Studi Kewenangan Terhadap Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Konstitusional Badan Peradilan Khusus	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) BIAK-PAPUA	TIMUR



NO	JUDUL PROPOSAL	ASAL UNIVERSITAS	REGIONAL
29	Penataan Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Prinsip Necessity Dalam Perppu No. 1 Tahun 2020)	Fakultas Hukum Universitas Jember	TIMUR
30	Persepsi Akademisi Fakultas Hukum Se-Kota Bengkulu Terhadap Kesalahan Redaksi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH	BARAT
31	Model Kebijakan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara dalam Masa Pandemi Covid 19 (Negara dalam Keadaan Darurat)	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	BARAT
32	Implikasi Penerapan Metode Omnibus Law dalam Sistem Pembentukan Perundang-Undangan Indonesia di Tinjau dari Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	BARAT
33	Polemik Hukum Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Pemilihan Serentak 2024	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	TENGAH
34	Implikasi Berlakunya UU Cipta Kerja No. 11/2020 Yang Melahirkan Penpres No. 10/2021 Terhadap Dunia Investasi di Indonesia (Studi Perbandingan Daftar Negatif Investasi dengan Daftar Putih Investasi dari Segi Kemudahan Berusaha)	Fakultas Hukum Universitas Pancasila	BARAT
35	Critical Study Terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Legislatif Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017	Fakultas Hukum Universitas Mummadiyah Mataram	TIMUR
36	Menakar Keberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja Dengan Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process dan Idiology (ROCCIPI)	Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	TENGAH
37	Rekonstruksi Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Pada Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum	Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai	BARAT
38	Judicial Activism Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Alternatif Justifikasi Dan Konseptualisasi)	Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	TENGAH
39	Metode Mahkamah Konstitusi Dalam Menghasilkan Putusan Konstitusional Demokratis Terhadap Sengketa Pemilu Serentak 2024 (kajian Hukum Progresif)	Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Gorontalo	TIMUR
40	Perlindungan Hak-Hak Beragama Debitur Dalam Perjanjian Jasa Keuangan dan Perjanjian Pembiayaan Dikaitkan Dengan Pasal 29 UUD 1945	Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul	BARAT
41	Pengujian Formal Sebagai Sarana Legalisasi Undang-Undang Yang Cacat Prosedural: Studi Kasus Pengujian Formal Undang-Undang Cipta Kerja	Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Universitas Kristen Satya Wacana	TENGAH
42	Menggagas Putusan Mahkamah Konstitusi Berbasis Keadilan Berdasarkan Hukum Dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Sengketa Pemilu Serentak Tahun 2024	Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan	TIMUR



NO	JUDUL PROPOSAL	ASAL UNIVERSITAS	REGIONAL
43	Penafsiran Keadaan Bahaya Dan Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Dasar Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menurut UUD 1945	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	BARAT
44	Cartel Politik Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Melalui Penetapan Ambang Batas	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat	TIMUR
45	Legitimasi Dan Formulasi Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Dalam Perkara Judicial Review Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja	Fakultas Hukum Universitas Mataram	TIMUR
46	Rekonstruksi Ex Officio Dalam Ranah Yudikatif Indonesia Di Era 4.0: Desain Alur Persidangan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Mewujudkan Harmonisasi Putusan Di Tengah Pandemi	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	TIMUR
47	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu : Menggagas Praktek Di Mahkamah Konstitusi Dalam Menyongsong Pemilu Serentak 2024	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	TIMUR
48	Potensi Kerugian Konstitusional Atas Hak Bertempat Tinggal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	Fakultas Hukum Universitas Pancasila	BARAT
49	Analisis Konsistensi Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Tujuan Negara Dan Keadilan Ekonomi	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	TIMUR
50	Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Presidential Thresold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Presiden Dan Upaya Musyawarah Mufakat Untuk Meminimalisir Konflik Pasca Pemilu Tahun 2024	Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan	TIMUR
51	Tantangan Mahkamah Konstitusi Atas Politik Figuran Di Daerah (Studi Terhadap Pergantian Antar Waktu Wakil Bupati Cirebon)	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon	BARAT
52	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Menerapkan Regulasi dan Kebijakan Terhadap Negara dalam Keadaan Darurat	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	BARAT
53	Konstruksi Hukum Pemberlakuan Negara Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Kaidah Kegentingan Yang Memaksa	Fakultas Hukum Universitas Mataram	TIMUR
54	Akomodasi Masyarakat Hukum Adat Pada Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Nasional Di Tamannasional Dalam Perpektif Undang-Undang Ciptakerja	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	TIMUR
55	Pemenuhan Hak Konstitusional Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja(Case Study Perseroan Terbatas di Sulawesi Selatan)"	Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	TIMUR
56	Arah Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Kerangka Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perizinan	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	TIMUR
57	Mahkamah Konstitusi Dalam Diskursus Penerapan Hukum Darurat Negara Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	Fakultas Hukum Universitas Surabaya	TIMUR



NO	JUDUL PROPOSAL	ASAL UNIVERSITAS	REGIONAL
58	Konstitusionalisme Dalam Keadaan Darurat sebagai Kepentingan Keselamatan Publik	Fakultas Hukum Universitas Jakarta	BARAT
59	Desain Konstitusional Perlibatan Mahkamah Konstitusi Terkait Penetapan Kondisi Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	TIMUR
60	Penyelesaian Pilkada Serentak Tahun 2024 Melalui Mediasi Di Tingkat Lokal (Studi Peluang dan Tantangan Balai Mediasi NTB)	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram	TIMUR
61	Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Dimensi Hukum Tata Negara Darurat; Sebuah Perbandingan Berbagai Negara-Negara Dunia	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	BARAT
62	Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak Tahun 2024 Menggunakan Teori Keadilan Bermartabat” (Penguatan Sentra Gakkumdu dan Penguatan Mahkamah Konstitusi melalui Pembentukan Peradilan Khusus Kepemiluan di bawah Mahkamah Konstitusi)	Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan	BARAT
63	Rekonsepsi Dan Batasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Keadaan Darurat	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	TIMUR
64	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Atas Hak Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Studi Di Disnakertrans Kota Malang	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	TIMUR
65	Perlindungan Bidang Jam Kerja Pada pekerja Perempuan Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Provinsi Kalimantan Selatan	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	TENGAH
66	Dinamika Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Mahkamah konstitusi : Telaah Terhadap Desain Penyelesaian sengketa Pemilu Secara Serentak Tahun 2024 Dalam upaya Mewujudkan Keadilan Substantif	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	TIMUR
67	Desain Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Serentak 2024 Berbasis Nilai Keadilan	Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri	TENGAH
68	Kompetensi Pemohon Dalam Beracara Penyelesaian hasil Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Dimahkamah Konstitusi : Kajian Konsep Dan Praktik	Fakultas Hukum Universitas Samudra	BARAT
69	Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Tradisional Melalui Affirmative Action (Studi Kasus Masyarakat Tradisional Suku Tengger Di Jawa Timur)	Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	TENGAH
70	Masa Depan Otonomi Daerah Terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi Ataukah Desentralisasi)	Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara	TIMUR
71	Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Penambangan Emas Liar di Desa Huta Bargot Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal)	Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan	BARAT



NO	JUDUL PROPOSAL	ASAL UNIVERSITAS	REGIONAL
72	Makna "Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa" Sebagai Alasanpembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	BARAT
73	Konstruksi Politik Hukum Penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Berbasis Kearifan Lokal Studi Terhadap Pilkada Serentak Di Papua	Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua	TIMUR
74	Penanganan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung	BARAT
75	Tolok Ukur Kesiapan Mahkamah Konstitusi Dalam Menghadapi Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Indonesia (Studi Kasus Kabupaten Manggarai Timur Dan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur)	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	TIMUR
76	Penghapusan Sanksi Pidana Pada Penyelesaian Upah Sebagai Wujud Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Undang-Undang Cipta Kerja	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	TIMUR
77	Problematika Pengujian Peraturan Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	Fakultas Hukum Universitas Pamulang	BARAT
78	Analisis Penanganan Sengketa Hasil Pilkada Serentak di TingkatDaerah Tahun 2024	Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang	TIMUR
79	Analisis Yuridis Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Peningkatan Perekonomian Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta	TENGAH
80	Urgensi Formulasi Waktu Pengajuan Judicial Review Terhadap Produk Undang-Undang Yang Baru Diundangkan	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	TENGAH
81	Rekonstruksi Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat	Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	TENGAH
82	Judicial Restraint Terhadap Sengketa Perselisihan Pemiluserentak 2024 Demi Perwujudan Putusan Mahkamahkonstitusi Yang Responsif Dan Futuristik	Fakultas Hukum Universitas Lampung	BARAT
83	Perbedaan Kebijakan Pelarangan Mudik Dalam Provinsi Ditinjau Dari Hukum Kedaruratan (Studi Kasus di Jambi dan Sumatera Selatan)	Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	BARAT
84	Penguatan Sistem Presidensial dan Masa Depan Pemilu Serentak Yang Berkeadilan di Dalam Bingkai Putusan Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019)	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	TIMUR
85	Kepastian Hukum dalam Proses Pembentukan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung	BARAT
86	Pemenuhan Hak Konstitusional Atas Jaminanperlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Pada Putusan MK No No 83/PUU-XVII/2019 Terhadap UU No 11tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	TIMUR



NO	JUDUL PROPOSAL	ASAL UNIVERSITAS	REGIONAL
87	Harmonisasi Sanksi Pidana di Dalam UU Cipta Kerja Dengan Kuhp Sebagai Induk Sistem Hukum Pidana Di Indonesia	Fakultas Hukum Universitas Lampung	BARAT
88	Implikasi UU Cipta Kerja Terhadap Administrasi Pemerintahan dan Penyelesaian Sengketa Administrasi Berdasarkan Konsepsi Negara Hukum	Fakultas Hukum Universitas Andalas	BARAT
89	Rekonstruksi Dan Eksistensi Penanganan Sengketa Dalam Problematika Pemilu Serentak 2024	Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri	TENGAH
90	Pergeseran Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Sektor Perizinan Pasca Berlakunya Uu No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Otonomi Daerah (Studi Di Sumatera Utara)	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	BARAT
91	Rekonseptualisasi Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	BARAT
92	Implementasi Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 Terhadap Hakanak Untuk Mendapatkan Pendidikan dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Anak Tidak Mampu Dan Rentan Akses Inklusif)	Fakultas Hukum Universitas Pancasila	BARAT
93	Dampak Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Terkait Tambang Rakyat di Kabupaten Bangka	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	BARAT
94	Perkembangan Kebutuhan Constitutional Complaint Di Indonesia	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	TENGAH
95	Konstruksi Indikator Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilu Dalam Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi	Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta	TENGAH
96	Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berkaitan Dengan Penerapan "State of Exception" dalam Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Indonesia	Fakultas Hukum Universitas Janabadra	TENGAH
97	Redefinisi Keadaan Darurat Dalam Hukum Tata Negara	Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	BARAT
98	Problematik Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Pendapat DPR Dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden	Fakultas Hukum Universitas Bosowa	TIMUR
99	Desain Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah (Menjawab Aktualisasi Putusan Mahkamah Konstitusi)	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	TIMUR



NO	JUDUL PROPOSAL	ASAL UNIVERSITAS	REGIONAL
100	Urgensi Nilai Pancasila dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terkait Pemenuhan Upah Layak Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional di Mahkamah Konstitusi	Pusat Studi Konstitusi Dan Otonomi Daerah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung	TIMUR
101	Penerapan Asas Keseimbangan dalam Undang-Undang Ciptakerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia	Fakultas Hukum Universitas Andalas	BARAT
102	Penetapan Status Keadaan Bahaya oleh Presiden dalam Penanganan Kasus Separatisme Bersenjata	Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung	BARAT
103	Konstruksi Hukum Penataan Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak 2024 Pasca Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 Untuk Mewujudkan Keadilan Konstitusional	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya	TIMUR
104	Pemetaan Sengketa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK-SKLN)	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	BARAT
105	Rekonstruksi Kewenangan Lembaga Peradilan Dalam Penanganan Sengketa Hasil Pemilukada Dimasa Depan Perspektif Kepastian Hukum	Fakultas Hukum Universitas Medan Area	BARAT
106	Analisis Penataan Regulasi Melalui Undang-Undang Cipta Kerja	Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan	TENGAH
107	Harmonisasi Antara Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Penguatan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menjelang Pilkada 2024	Universitas Sulawesi Tenggara Kendari	TIMUR
108	Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Pemilu	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang	BARAT
109	Rekonstruksi Pengaturan Situasi Darurat Guna Menegakkan Supremasi Konstitusi	Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	TIMUR
110	Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Proses Perijinan Label Halal	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	TIMUR
111	Desain Konstitusional Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak 2024: Studi Pemenuhan Hak Sipil Politik Dan Keadilan Pemilu	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	BARAT

